

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016
 UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 22,334,547,500	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 715,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,338,790,500	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 737,116,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,095,341,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 673,300,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 39,817,583,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 655,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 30,905,334,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 678,466,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 805,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 555,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,356,213,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 612,570,000	
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 12,480,386,500	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 655,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 8,269,840,500	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 654,633,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 492,596,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,369,917,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 548,400,000	
4.	PROVINSI RIAU	<u>Rp 20,168,694,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 638,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 15,064,850,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 650,202,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 302,958,000	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 360,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,875,464,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 477,220,000	
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 6,379,492,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 680,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,665,323,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 692,806,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 346,248,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 558,268,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	
	4) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,133,917,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 502,930,000	
6	PROVINSI JAMBI	<u>Rp 18,937,423,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 15,068,150,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 599,294,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 545,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,610,769,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 464,210,000	
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	<u>Rp 24,331,036,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 657,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,997,320,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 616,232,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,392,595,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,841,169,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 426,720,000	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp 6,789,483,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 3,673,334,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 645,953,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 270,172,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 679,754,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 500,270,000	
9	PROVINSI BENGKULU	Rp 16,577,510,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 675,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 12,272,760,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 725,605,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 906,068,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,216,677,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 531,400,000	
10.	PROVINSI LAMPUNG	<u>Rp 35,542,080,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 240,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 27,844,505,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 800,264,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,162,661,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 494,650,000	
11.	PROVINSI BANTEN	<u>Rp 21,736,886,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 682,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,700,930,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 549,845,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buat	Rp 685,628,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,462,383,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 356,100,000	
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	<u>Rp 1,660,091,000</u>	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 505,610,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 818,911,000	
	c. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 335,570,000	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	<u>Rp 38,171,003,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 700,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 470,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 30,431,790,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 703,951,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 319,920,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 636,780,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 4,371,212,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 537,350,000	
14	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 30,422,443,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 697,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 22,260,390,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 706,902,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 756,936,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 585,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,896,565,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 629,650,000	
15	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp 8,264,836,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 665,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 400,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 4,652,668,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 690,541,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 273,859,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 577,008,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 405,760,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 31,028,694,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 685,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 480,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 22,138,396,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 578,475,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 315,676,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 669,500,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 4,849,347,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 662,300,000	
17.	PROVINSI BALI	<u>Rp 6,301,427,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 810,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,897,080,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 766,376,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 304,492,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,343,069,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 380,410,000	
18	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 25,844,525,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 667,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 19,131,514,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 606,707,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 816,864,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	
	4) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	5) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 340,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,885,250,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 497,190,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
19	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp 14,056,156,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 698,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 9,651,030,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 651,300,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,908,206,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 497,620,000	
20	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 20,721,151,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 705,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 16,482,490,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 554,727,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 303,935,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 624,820,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 962,059,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 488,120,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<u>Rp 13,332,973,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 700,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 9,723,260,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 532,629,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 258,237,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,234,387,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 384,460,000	
22	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 22,705,622,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 721,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,726,820,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 776,918,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 299,552,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 400,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,969,332,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 512,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
23	PROVINSI GORONTALO	Rp 10,898,846,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 683,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 425,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 7,729,550,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 671,998,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 714,738,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 424,560,000	
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 25,574,681,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 683,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 330,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,337,400,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 688,461,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,688,480,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 547,340,000	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 11,685,174,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 6,926,844,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 815,086,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 225,281,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 537,308,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,546,265,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 414,390,000	
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 26,543,790,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 678,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 260,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,357,942,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 686,333,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 860,856,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,819,899,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 480,760,000	
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>Rp 15,778,681,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 770,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 8,219,100,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 765,690,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 960,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,747,461,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 526,430,000	
28	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<u>Rp 16,030,596,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 10,178,376,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 783,953,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,910,847,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 457,420,000	
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 33,099,703,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 25,975,370,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 763,322,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 323,701,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,536,620,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 650,690,000	
30	PROVINSI MALUKU	Rp 21,490,125,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 732,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 16,550,395,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 735,514,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,317,826,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 554,390,000	
31	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>Rp 17,379,191,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 12,994,193,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 848,539,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 568,514,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,765,565,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 532,380,000	
32	PROVINSI PAPUA	<u>Rp 29,960,813,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 794,000,000	
	b) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,201,390,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 583,170,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,692,093,000	
	e. PR O		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 590,160,000	
33	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 25,209,952,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 20,371,680,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 606,912,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,314,980,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 416,380,000	
34	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 8,740,604,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 695,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA		DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 5,261,185,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 626,470,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 499,236,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 671,813,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN POLITIK DAN UMUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan PUM		
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 486,900,000	

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA,**

tt

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

TJAHJO KUMOLO

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.